

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi ialah suatu mekanisme yang dilakukan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesuksesan pembangunan ekonomi, dapat diidentifikasi melalui stabilitas sistem keuangan dan kebermanfaatannya bagi seluruh elemen masyarakat (Iskandar Umar, 2017). Sektor keuangan memegang peranan dalam memacu adanya pertumbuhan, pemerataan pendapatan, penyelesaian kemiskinan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan melalui fungsi intermediasinya (Iskandar Umar, 2017). Sektor keuangan dapat melancarkan mobilisasi modal untuk proyek-proyek dengan hasil tinggi melalui proses intermediasi keuangan serta dapat memastikan alokasi sumber daya keuangan yang efisien antara peminjam dan pemberi pinjaman (Malik et al., 2022).

Tahun 2022 industri keuangan sudah berkembang dengan sangat pesat. Tetapi, fenomena tersebut tidak menjamin adanya akses terhadap keuangan yang memadai. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perekonomian secara luas, perlu meningkatkan aksesibilitas masyarakat akan layanan keuangan (Iskandar Umar, 2017). Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengatasi permasalahan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sebab perekonomian memiliki ketergantungan pada industri keuangan dalam hal ini perbankan, khususnya sebagai modal kerja ataupun dana investasi pada sektor rill layaknya UMKM (Malik et al., 2022). Dalam hal ini terlihat bahwa

perkembangan industri keuangan memiliki andil dalam perekonomian khususnya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Sektor keuangan memiliki dinamika yang tidak lepas kaitannya dengan bagaimana sistem keuangan melaksanakan fungsinya. Dalam sistem keuangan terdapat pelaku, produk, kebijakan, serta proses berlangsungnya sebuah kegiatan (Adriani & Wiksuana, 2018). Dalam ranah perekonomian nasional, adanya sistem keuangan akan menyediakan lebih banyak ruang bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi ekonomi. Dalam skala regional, nasional, maupun internasional, peran sistem keuangan dianggap sebagai tonggak atau pondasi bagi perekonomian (Adriani & Wiksuana, 2018). Oleh karenanya, sistem keuangan menjadi salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

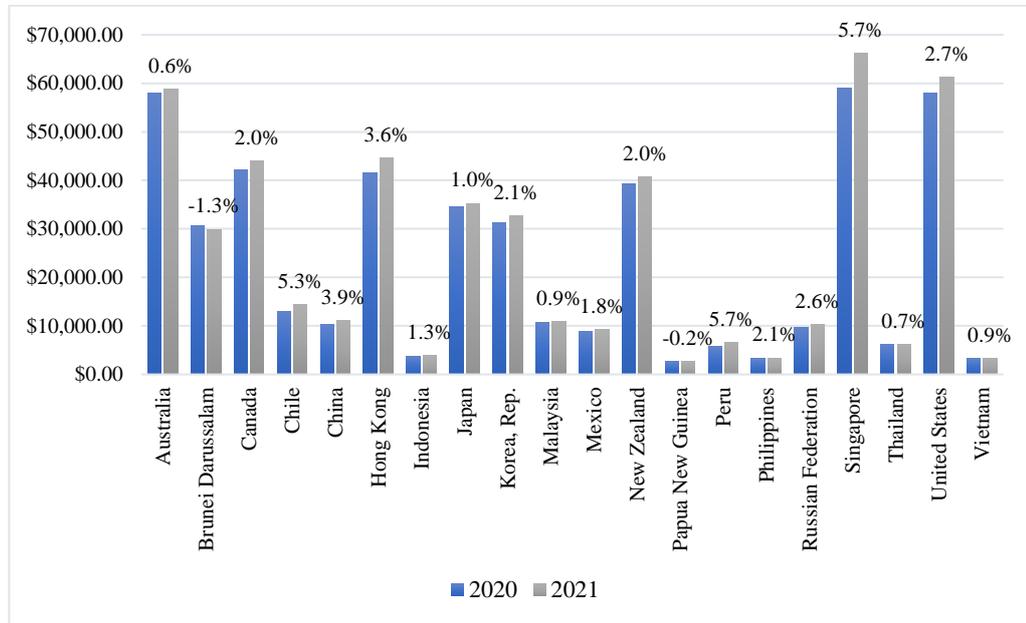
Kebijakan dalam sektor keuangan memiliki implikasi baik secara positif maupun negatif bagi perekonomian negara. Dalam waktu yang sama, adanya hambatan pada sektor keuangan akan memengaruhi program pembangunan di suatu negara (Malik et al., 2022). Meskipun banyak indikator yang perlu dicapai untuk merealisasikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara, sektor keuangan memegang peranan yang vital. Salah satu kebijakan sektor keuangan yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian ialah inklusi keuangan. World Bank (2022) inklusi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu maupun bisnis untuk mengakses produk dan pelayanan keuangan yang bernilai dan terjangkau guna mencukupi kerperluannya, seperti

melakukan transaksi, pembayaran, menabung, meminjam, juga mengasuransikan diri.

Inklusi keuangan memberikan beberapa efek positif seperti mampu menambah Memperluas portofolio aset perbankan untuk memperkayakan jenis investasi, memotivasi masyarakat untuk menyimpan lebih banyak dana sehingga stabilitas dasar tabungan bertambah, mengurangi risiko fluktuasi pasar, dan membantu transmisi kebijakan moneter (Hardiyanto & Arianti, 2019). Disamping itu, inklusi keuangan juga memberikan beberapa efek negatif bagi kestabilan sistem keuangan seperti dapat mengakibatkan penurunan standar kredit yang memungkinkan lembaga keuangan untuk diakses oleh kalangan bawah. yang *unbankable* dengan mengurangi persyaratan pinjaman, selain itu dapat menurunkan reputasi bank karena pemerintah berusaha menurunkan standar mendirikan lembaga keuangan di desa, juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan sebab aturan yang eksklusif dan memenuhi dari lembaga *microfinance* (Hardiyanto & Arianti, 2019).

Keuangan inklusif akan membantu rumah tangga ataupun bisnis apabila terjadi keadaan darurat yang tidak terduga sebelumnya, seperti krisis akibat merebaknya COVID-19 pada awal 2020 silam. Mendorong kemudahan akses keuangan bagi masyarakat akan mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2021). Krisis yang sedang berlangsung menyebabkan perekonomian negara berkontraksi. Hampir seluruh pelaku ekonomi terkena dampak dari krisis tersebut. Dalam rumah tangga, krisis menyebabkan pendapatan mereka menurun akibat kebijakan PHK dari

tempatnnya bekerja atau karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat (*lockdown*) seperti PSBB dan PPKM.



Sumber: World Bank, 2022

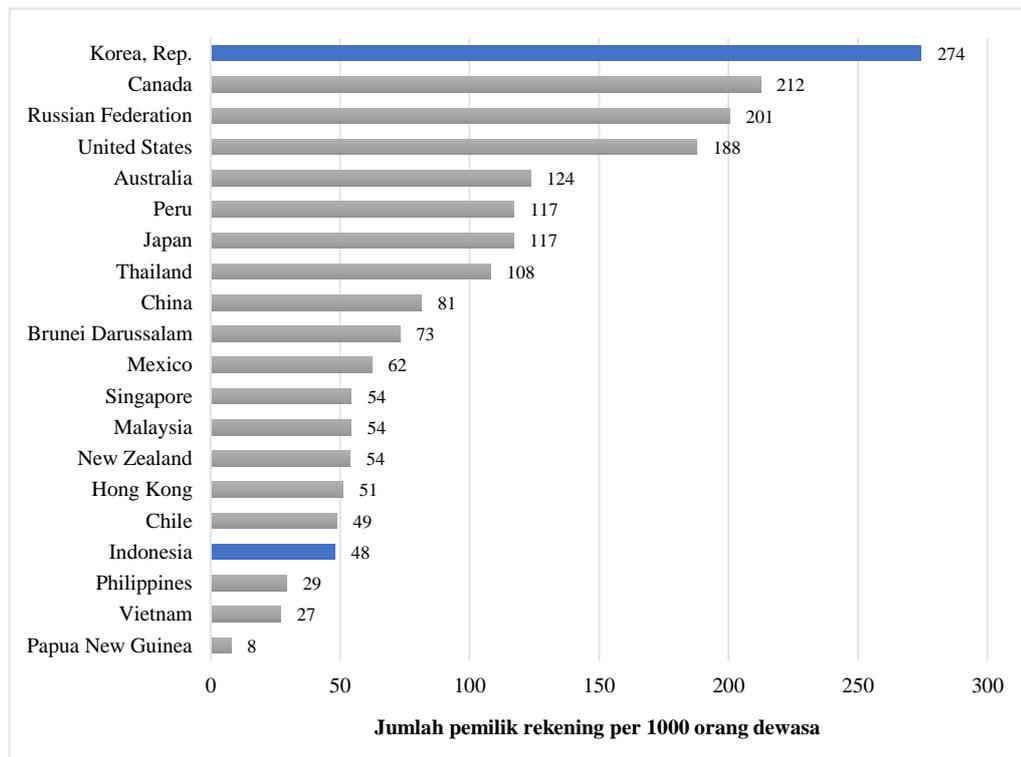
**Grafik 1.1**  
**PDB Per kapita Negara-Negara Peserta APEC Tahun 2020-2021**

Pada grafik 1.1 di atas tampak bahwa secara nasional mayoritas negara peserta APEC mengalami peningkatan PDB per kapita pada tahun kedua setelah merebaknya wabah. Mengingat pada tahun 2020, PDB Per kapita sempat terdepresiasi karena pandemi COVID-19 yang menjalar di seluruh dunia. Membaiknya perekonomian disinyalir karena adanya rencana strategis dari masing-masing negara untuk mengatasi krisis, sebagai contoh di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon krisis dengan mendorong keuangan yang inklusif, supaya akses masyarakat pada produk dan pelayanan keuangan dapat meningkat. Keuangan yang inklusif mampu menjadi solusi pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena

masyarakat mampu menggunakan produk dan pelayanan keuangan menurut kebutuhannya (OJK, 2021).

Di samping karena adanya krisis, keuangan yang inklusif sudah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia jauh sebelum pandemi terjadi. Terhitung pada tahun 2016, Presiden Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong laju pertumbuhan, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antarindividu maupun daerah guna merealisasikan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui inklusi keuangan (Perpres RI No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif). Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) melalui Finance Minister Process (FMP) juga mendorong agenda inklusi keuangan di kawasan. Terhitung sejak tahun 2015, FMP berusaha membangun keuangan Asia Pasifik menjadi lebih inklusif, agar dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat di kawasan (Hernando, 2018).

FMP APEC memiliki prioritas untuk meningkatkan akses ke modal dan pasar, khususnya untuk usaha kecil yang mencakup lebih dari 97 persen perusahaan dan setengah lapangan kerja untuk perekonomian APEC serta, mengembangkan dan menghubungkan biro informasi kredit di antara negara-negara APEC guna menyajikan informasi kredit yang tersedia mengenai calon debitur, serta memungkinkan kemudahan analisis risiko dan akses pembiayaan yang lebih cepat (Hernando, 2018).

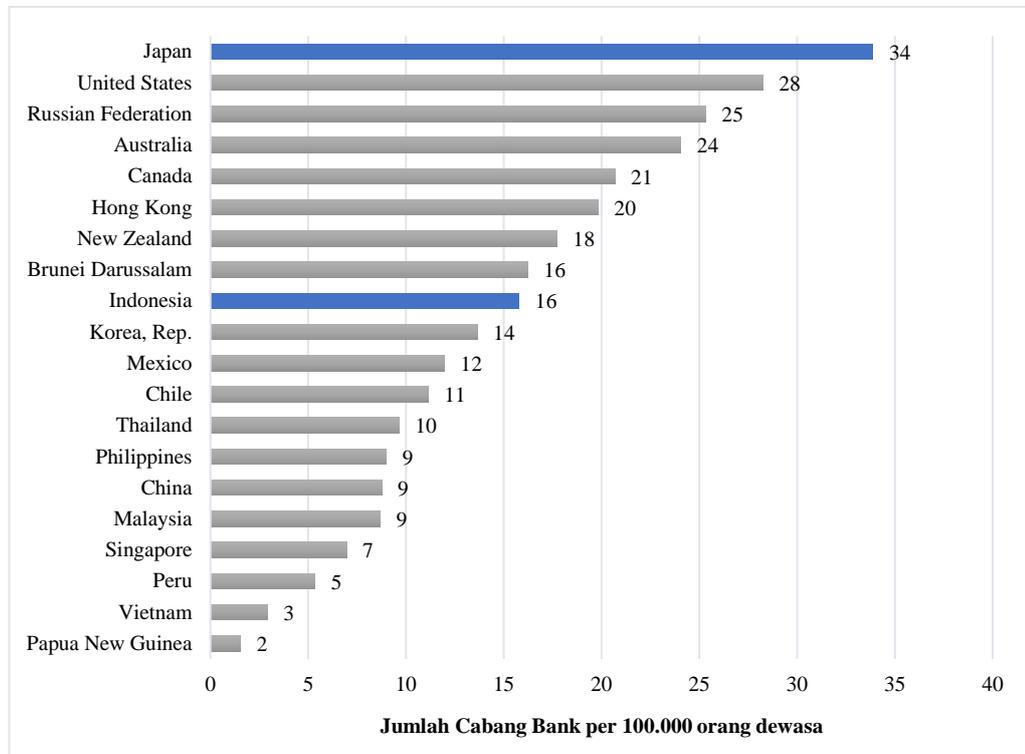


Sumber: International Monetary Fund, 2022

### **Grafik 1. 2** **Penetrasi Perbankan di Negara-Negara Peserta APEC Tahun 2021**

Grafik di atas menggambarkan bagaimana penetrasi perbankan di masing-masing negara peserta APEC. Penetrasi perbankan adalah banyaknya pemilik rekening dalam suatu negara. Dalam grafik 1.2 dapat dilihat, per 1000 orang dewasa terdapat 274 orang pemilik rekening di Korea Selatan. Nilai tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan pemilik rekening terbanyak dari seluruh peserta APEC. Hal tersebut dapat diindikasikan karena Korea Selatan merupakan negara maju dengan pendapatan PDB per kapita yang tinggi. Sedangkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemilik rekening terendah keempat dari seluruh negara peserta APEC. Dengan jumlah pemilik

rekening terendah adalah Papua Nugini sebanyak 8 orang per 1000 orang dewasa.



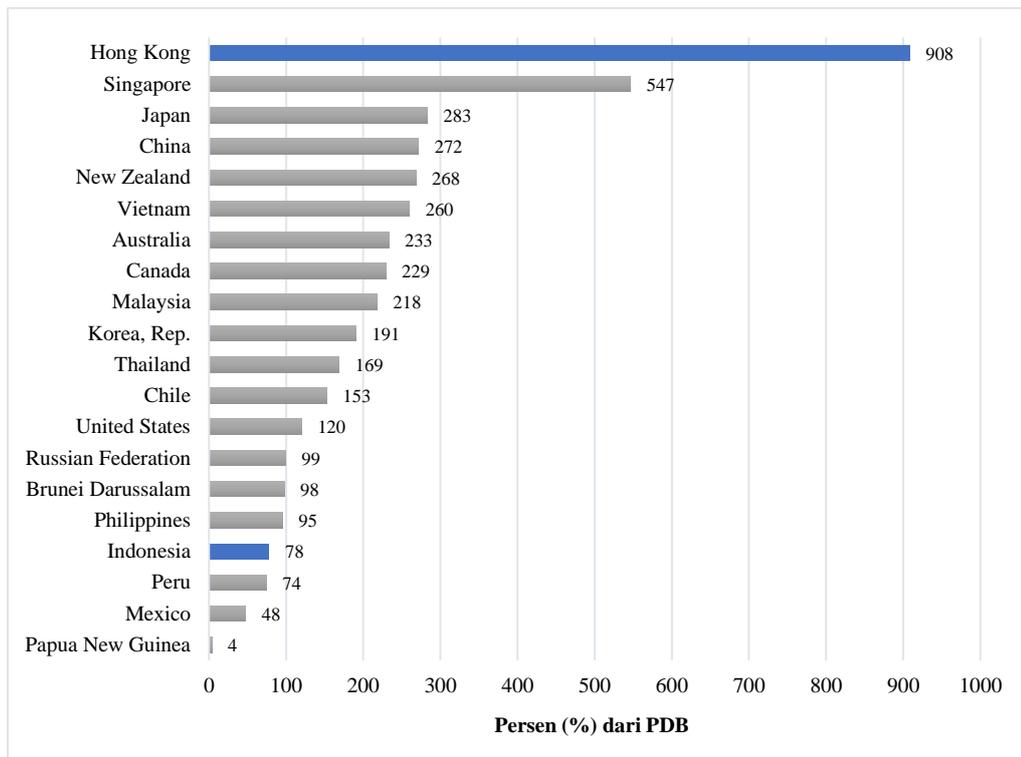
Sumber: International Monetary Fund, 2022

### **Grafik 1.3** **Availibilitas Perbankan di Negara-Negara Peserta APEC Tahun 2021**

Grafik di atas menggambarkan availibilitas perbankan di masing-masing negara peserta APEC pada tahun 2021. Availibilitas perbankan merupakan jumlah ketersediaan cabang bank dalam suatu negara. Dapat dilihat pada grafik 1.3, per 100.000 orang dewasa terdapat sejumlah 34 cabang bank di Jepang. Jumlah ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan jumlah cabang bank terbanyak di seluruh negeri peserta APEC. Terendah merupakan Papua Nugini hanya sebanyak 2 cabang bank per 100.000 orang dewasa. Sedangkan, di Indonesia hanya terdapat sejumlah 16 cabang bank setiap 100.000 orang dewasa,

kondisi ini menandakan bahwa persebaran bank belum cukup merata di seluruh wilayah Indonesia.

Padahal, inklusi keuangan memiliki dampak positif bagi perekonomian melalui persebaran jumlah cabang bank umum (Iramayasari & Adry, 2020). Mengacu pada salah fungsi bank yakni memindahkan dana dari individu atau lembaga keuangan yang memiliki surplus dana kepada mereka yang membutuhkan dana, yang mana hal itu menjadi pelumas bagi perekonomian sektor riil. Kemudahan akses masyarakat pada bank akan meningkatkan kemungkinan bank dalam memobilisasi kredit dengan jumlah yang lebih besar (Iramayasari & Adry, 2020). Hal tersebut tentu akan mendorong adanya pertumbuhan dan peningkatan investasi pada sektor riil, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini akan meningkatkan kebutuhan pekerja, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Anwar & Amri, 2017).



Sumber: International Monetary Fund, 2022

**Grafik 1. 4**  
**Usabilitas Perbankan di Negara-Negara Peserta APEC Tahun 2021**

Grafik di atas menggambarkan usabilitas perbankan di masing-masing negara peserta APEC pada tahun 2021. Usabilitas perbankan merupakan nilai agregat dari *outstanding loan* dan *outstanding deposit* dengan tolok ukur nilai PDB masing-masing negara. Dapat dilihat pada grafik 1.4, Hong Kong memiliki usabilitas perbankan tertinggi dengan nilai 908% dari PDB negaranya atau sebanyak sembilan kali lipat dari total PDB. Usabilitas perbankan Indonesia hanya memiliki nilai 78% dari PDB atau lebih rendah dari PDB. Sedangkan, usabilitas perbankan terendah adalah Papua Nugini yang hanya senilai 4% dari PDB negaranya.

Penyaluran kredit sejatinya akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (Anwar & Amri, 2017). Kemudahan kredit juga akan mendorong tingginya minat investasi sehingga akan mempercepat perekonomian. Selain itu, ketersediaan mesin ATM juga akan mendorong perekonomian melalui perputaran uang di masyarakat yang lebih cepat (Anwar & Amri, 2017). Keberadaan ATM akan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran ataupun transaksi ekonomi lainnya. Inklusi keuangan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, yang mana pertumbuhan ini dapat menjadi akselerator bagi perekonomian (Adriani & Wiksuana, 2018). Selanjutnya, Adriani & Wiksuana (2018) mengatakan meskipun inklusi keuangan mampu menjadi akselerator pertumbuhan UMKM, tetapi inklusi keuangan belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APEC berusaha mengimplementasikan inklusi keuangan secara efektif dan berkesinambungan untuk memastikan lebih banyak orang dapat menggunakan layanan keuangan, termasuk kaum marjinal dan mereka yang tinggal di pelosok desa (Hernando, 2018). Meskipun kemudahan akses pada layanan keuangan disinyalir dapat mempercepat perekonomian, tetapi perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Jika berkaca pada kondisi krisis finansial tahun 2008, dimana kondisi tersebut disebabkan oleh akumulasi kredit berlebih di Amerika Serikat (Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2009). Seluruh dunia mengalami dampaknya, termasuk kawasan ekonomi Asia Pasifik yang didominasi oleh negara berkembang. Fenomena yang

terjadi pada tahun 2008 silam bertentangan secara teori, khususnya dengan teori *financial development*. Dalam hal ini, *financial development* seperti akses, kedalaman, dan efisiensi sistem keuangan seharusnya mendorong pertumbuhan (Santoso, 2018). Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan terhadap Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus di Negara-Negara Peserta APEC Tahun 2008-2021)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Penetrasi Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?
2. Bagaimana pengaruh Ketersediaan Jasa Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?
3. Bagaimana pengaruh Kegunaan Jasa Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?
4. Bagaimana pengaruh Bank Z-Score terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?
6. Bagaimana pengaruh Indeks Perkembangan Keuangan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penetrasi Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ketersediaan Jasa Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kegunaan Jasa Perbankan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bank Z-Score terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Perkembangan Keuangan terhadap PDB Per kapita di Negara-Negara peserta APEC

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait mengenai sektor keuangan yang khususnya pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari kajian ini harapannya bisa dimanfaatkan sebagai referensi atau bisa juga sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, yang terkait tentang sektor keuangan yang khususnya pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan, serta dapat diharapkan juga penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari kajian ini harapannya bisa membantu untuk menyumbangkan informasi kepada pemerintah perihal kebijakan atau upaya apa yang bisa dilakukan dalam sektor keuangan yang khususnya pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat menyumbangkan informasi kepada masyarakat terkait sektor keuangan yang khususnya pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan, juga diharapkan masyarakat dapat memahaminya.